

# **PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG (01)**

## **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2025 (*Audited*)**

**Jalan Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI)  
Jakabaring Palembang  
Email : [palembang@dilmil.org](mailto:palembang@dilmil.org)  
Telpon : (0711)-5620579  
Fax : (0711)-5620579**



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025**

**BAGIAN ANGGARAN 001.05**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Gubernur H. Bastari Komplek OPI Jakabaring Palembang**

**Telp. (0711)-5620579 Fax. (0711)-5620579**

**E-mail : [palembang@dilmil.org](mailto:palembang@dilmil.org)**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palembang, 31 Desember 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Militer I-04 Palembang. The stamp contains the text 'PENGADILAN MILITER I-04' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Supriyadi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP. 21950303390275

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Pernyataan Tanggung Jawab .....	3
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	14
II. Neraca.....	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	23
A.    Penjelasan Umum.....	23
A.1.    DASAR HUKUM .....	23
A.2.    Profil dan Kebijakan Teknis PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG .....	24
A.3.    Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	25
A.4.    Basis Akuntansi .....	26
A.5.    Dasar Pengukuran .....	26
A.6.    Kebijakan Akuntansi .....	26
B.    Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran .....	35
Selama periode berjalan, Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan anggaran belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut : .....	35
B.1.    Pendapatan Negara dan Hibah .....	35
B.2.    Belanja .....	36
C.    Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	40
C.1.    Aset Lancar .....	40

C.2.	Aset Tetap.....	43
C.5.	Kewajiban Jangka Pendek.....	48
C.6.	Beban yang Masih Harus Dibayar .....	49
C.7.	Ekuitas .....	50
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	50
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	50
D.2.	Beban Pegawai .....	50
D.3.	Beban Persediaan.....	51
D.4.	Beban Barang dan Jasa .....	51
D.5.	Beban Pemeliharaan .....	52
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	53
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	53
D.8.	Beban Bantuan Sosial .....	54
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	55
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....	55
D.11.	Beban Lain-lain.....	56
D.12.	Kegiatan Non Operasional .....	56
D.13.	Pos Luar Biasa.....	57
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	57
E.1.	Ekuitas Awal.....	57
E.2.	Surplus (defisit) LO .....	57
E.3.	Penyesuaian Nilai Aset .....	58
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan .....	58
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	58
	Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Selisih revaluasi ini merupakan revaluasi BMN/penilaian kembali tanah dan gedung bangunan kantor dan rumah dinas PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG oleh KPKNL Palembang.....	58
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi .....	58
E.4. 5	Koreksi Lain-lain .....	59

---

E.5. Transaksi Antar Entitas .....	59
E.6. Ekuitas Akhir .....	61
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	61
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	61
F.2. Pengungkapan Lain-lain.....	61
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap .....	62
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual .....	63

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

**Pengadilan MILITER I-04 PALEMBANG**  
Jalan Gubernur H. Bastari Komplek OPI Jakabaring Palembang  
Telp. (0711)-5620579 Fax. (0711)-5620579 E-mail : palembang@dilmil.org

## Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palembang, 31 Desember 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,



Supriyadi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP. 21950303390275

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG Semester II Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 15.131.117,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 0.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA. 2025 adalah sebesar Rp. 5.422.214.367,- atau mencapai 99,03 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.475.086.000,-.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 14.441.226.177,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 0,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 14.441.226.177,-; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 14.441.226.177,-.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 24.696.833,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 5.684.653.317,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (5.034.876.881,-) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing defisit sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0 sehingga entitas mengalami defisit -LO sebesar Rp. (5.659.956.367,-).

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 14.635.561.334,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (5.659.956.367) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 5.465.621.210,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 14.441.226.177,-.

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2025, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	SEMESTER II TA 2025			TA 2024
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	15.131.117	0	11.479.000
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>0</b>	<b>15.131.117</b>	<b>0</b>	<b>11.479.000</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	4.146.984.000	4.119.519.485	99,34	3.240.319.363
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.328.102.000	1.302.694.882	98,09	1.514.912.312
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	17.960.000
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>5.475.086.000</b>	<b>5.422.214.367</b>	<b>99,03</b>	<b>4.773.191.675</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

### PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

#### NERACA

Per 31 Desember 2025 DAN 2024

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2025	2024
<b>ASET</b>			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Persediaan	C.1. 2.	0	130.900
Jumlah Aset Lancar		0	130.900
Aset Tetap			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	10.466.081.000	10.466.081.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	3.894.271.984	3.817.524.274
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	4.650.227.000	4.650.227.000
Akumulasi Penyusutan	C.2. 4.	(4.569.543.807)	(4.016.429.814)
Jumlah Aset Tetap		14.441.226.177	14.917.592.460
Aset Lainnya			
C.3.			
Aset Tak Berwujud	C.3. 1.	75.302.000	75.302.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 2.	(75.302.000)	(75.302.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		14.441.226.177	14.918.575.460
<b>KEWAJIBAN</b>			
C.5			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	9.849.920
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	0	9.565.833
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	21.089.059
Jumlah Kewajiban		0	21.089.059

**EKUITAS**

Ekuitas	14.441.226.177	14.635.561.334
Jumlah Ekuitas	14.441.226.177	14.635.561.334
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	14.441.226.177	14.656.650.393

\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Per 31 Desember 2025 DAN 2024**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	0	0
<b>Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak</b>		<b>24.696.833</b>	<b>1.913.167</b>
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	4.111.739.485	2.541.780.768
Beban Persediaan	D. 3	41.601.307	31.464.285
Beban Barang dan Jasa	D. 4	861.177.794	959.886.642
Beban Pemeliharaan	D. 5	371.870.813	347.726.933
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	24.432.642	89.238.950
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	273.831.276	284.550.613
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>5.684.653.317</b>	<b>4.254.648.191</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(5.659.956.484)</b>	<b>(4.254.648.191)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
<b>Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>D 12</b>	<b>117</b>	<b>0</b>

Beban dari Kegiatan non operasional lainnya	D. 13	117	0
<b>Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>117</b>	<b>0</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>(5.659.956.367)</b>	<b>(5.034.876.881)</b>
Pos Luar Biasa	D. 14	0	0
<b>Pendapatan PNB</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beban Persediaan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Surplus (Defisit) Laporan Operasional</b>		<b>(5.659.956.367)</b>	<b>(5.034.876.881)</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Per 31 Desember 2025 DAN 2024**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	2025	2024
Ekuitas Awal	E. 1	14.635.561.334	14.908.725.540
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(5.659.956.367)	(5.034.876.881)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.4	0	(33.726.404)
Koreksi Lain-lain	E. 3.5	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	5.465.621.210	4.761.712.675
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 5	(194.335.157)	(273.164.206)
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>E. 6</b>	<b>14.441.226.177</b>	<b>14.635.561.334</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

## **A.2. Profil dan Kebijakan Teknis PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang yaitu:

" Terwujudnya Pengadilan Militer I-04 Palembang Yang Agung "

Misi Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai ketentuan yang berlaku

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Militer I-04 Palembang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kinerja Sumber Daya Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang,  
hal-hal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan ini adalah :
  - Meningkatkan kualitas putusan hakim
  - Mempercepat penyelesaian perkara
  - Menguasai Standar Operation Procedure (SOP) sesuai bidang masing-masing
  - Pengawasan yang berkualitas
  - Menerapkan reward dan punishment untuk mengontrol kinerja
  - Dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja
2. Meningkatkan kualitas publik, hal-hal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan ini adalah :
  - Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
  - Meningkatkan sarana, prasarana, dan teknologi informasi untuk pelayananan Publik
  - Mengembangkan sistem informasi perkara

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tandar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut:

#### a. Pendapatan LRA

---

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### b. Pendapatan LO

---

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### c. Belanja

---

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### d. Beban

---

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### e. Aset

---

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

---

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> <li>Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan</li> <li>Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN</li> </ol>	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, dipelakukan sebagai beban kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan serta jalan, jaringan dan irigasi berupa jalan dan jembatan dan bangunan air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada laporan keuangan
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN

### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan at as ATB dengan mas a manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/ KM.6/ 2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	5
Franchise	10
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	20
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	25

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## 6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## 7. Ekuitas

---

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan anggaran belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	15.131.117
Jumlah Pendapatan	0	15.131.117
<b>BELANJA</b>		
Belanja Pegawai	3.857.222.000	4.146.984.000
Belanja Barang	1.500.034.000	1.328.102.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	5.357.256.000	5.475.086.000

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah : Rp  
15.131.117*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 15.131.117 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

#### Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2025 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	0	0	0
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2025 ini merupakan hasil lelang penjualan barang milik negara.

Perbandingan realisasi PNBPA TA. 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPA per 31 Desember 2025 dan 2024**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	2024	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	15.131.117	11.479.000	0	0
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>15.131.117</b>	<b>11.479.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B.2. Belanja

*Realisasi  
Belanja Negara  
: Rp.  
5.422.214.367*

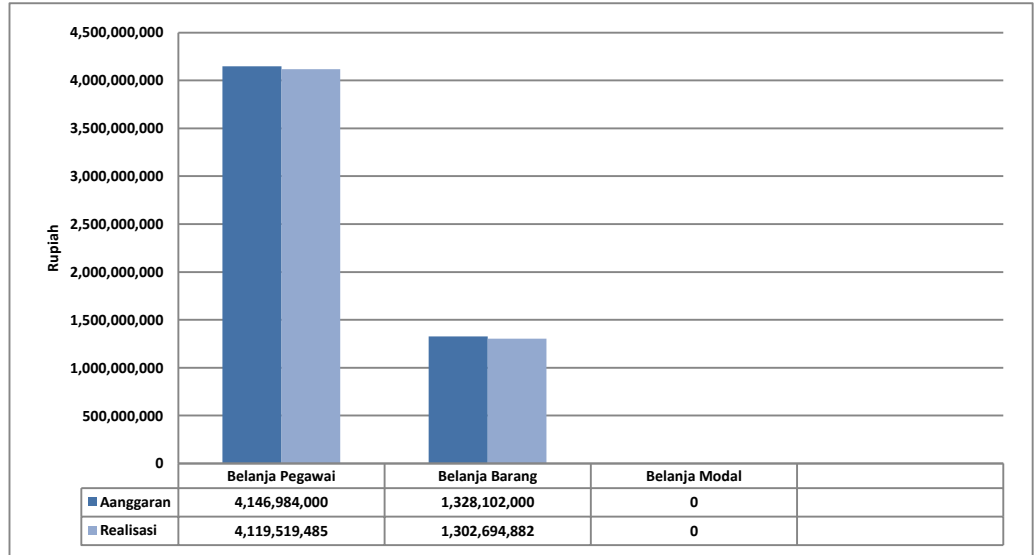
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Militer I-04 Palembang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 5.422.214.367 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99,03 persen dari anggaran senilai Rp. 5.475.086.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4.146.984.000	4.119.519.485	99,34
Belanja Barang	1.328.102.000	1.302.694.882	98,09
Belanja Modal	0	0	0
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>5.475.086.000</b>	<b>5.422.214.367</b>	<b>99,03</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>			
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>5.475.086.000</b>	<b>5.422.214.367</b>	<b>99,03</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025**  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Aplikasi SAKTI 2024

Realisasi Belanja Negara mengalami Kenaikan sebesar Rp. 649.022.692,- atau sebesar 13,60 persen dari realisasi tahun lalu.

Perbandingan realisasi belanja 31 Desember 2025 dan TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan TA 2024**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	TA 2024	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	4.119.519.485	3.240.319.363	879.200.122	27,13
Belanja Barang	1.302.694.882	1.514.912.312	(212.217.430)	14
Belanja Modal	0	17.960.000	(17.960.000)	(100)
<b>Total Belanja</b>	<b>5.422.214.367</b>	<b>4.773.191.675</b>	<b>649.022.692</b>	<b>13,60</b>

### B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi  
Belanja  
Pegawai : Rp.  
4.119.519.485*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Militer I-04 Palembang per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp. 4.119.519.485 dan Rp. 3.240.319.363 .

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan TA 2024**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	TA 2024	Naik (Turun)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	988.589.914	1.325.239.944	(336.650.030)	25,40
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	54.480.000	1.915.079.419	(1.860.599.419)	97,16
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	2.891.729.947	0	2.891.729.947	100
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	184.719.624	0	184.719.624	100
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>4.119.519.485</b>	<b>3.240.319.363</b>	<b>879.200.122</b>	<b>27,13</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>4.119.519.485</b>	<b>3.240.319.363</b>	<b>879.200.122</b>	<b>27,13</b>

### B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi  
Belanja Barang :  
Rp.  
1.302.694.882*

Realisasi Belanja Barang PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG per 31 Desember TA. 2025 dan TA. 2024 adalah sebesar Rp. 1.302.694.882 dan Rp. 1.514.912.312. Realisasi Belanja Barang TA. 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 212.217.430 atau 14 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA. 2024.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja barang pengiriman surat dinas pos pusat	4.000.000	6.722.410	(2.722.410)	(40,50)
Belanja Sewa	130.609.000	123.200.000	7.409.000	6,01
Belanja barang persediaan barang konsumsi	41.825.407	44.769.175	(2.943.768)	6,58
Belanja perjalanan dinas dalam kota	1.350.000	2.850.000	(1.500.000)	(52,63)
Belanja perjalanan biasa	23.082.642	49.011.770	(2.466.180)	(4,79)
Belanja Keperluan Perkantoran	649.750.419	783.967.693	(134.217.274)	(17,12)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	53.088.000	34.944.000	18.144.000	51,92
Belanja Barang Operasional Lainnya	4.200.000	2.100.000	2.100.000	100
Belanja Langganan Listrik	0	0	0	0
Belanja Langganan Telepon	6.443.542	5.502.445	(941.097)	(17,10)
Belanja Langganan Air	15.860.946	14.393.566	1.467.380	10,19
Belanja Pemeliharaan Halaman, Gedung dan Bangunan	234.452.295	257.462.940	(23.010.645)	(8,98)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	137.063.518	189.988.313	(52.924.795)	27,86
Biaya Belanja Dinas Sidang Keliling	0	0	(34.760.000)	(100)
Belanja Penanganan Covid	0	0	(2.170.900)	(100)
Belanja Pengadaan Inventaris CPNS	0	0	(3.950.000)	(100)
Belanja Alat Bantu Jalan	0	0	(330.000)	(100)
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>1.302.694.882</b>	<b>1.514.912.312</b>	<b>(212.217.430)</b>	<b>14</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>1.302.694.882</b>	<b>1.514.912.312</b>	<b>(212.217.430)</b>	<b>14</b>

### B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi  
Belanja Modal :  
Rp.0*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Militer I-04 Palembang per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 17.960.000

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	TA 2024	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	17.960.000	(17.960.000)	(100)
Pengadaan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (Jalur Disabilitas)	0	0	0	0
Renovasi Gedung/Kantor	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	17.960.000	(17.960.000)	(100)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	17.960.000	(17.960.000)	(100)

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

### C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar:* Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 130.900.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Militer I-04 Palembang per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah :

**Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	TA 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	0	130.900
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>0</b>	<b>130.900</b>

### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp. 0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2025	TA 2024
1	Kwitansi yang belum dipertanggungjawabkan	0	0
2	Uang tunai pada brankas Bendahara	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar di Muka: Rp. 0*

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

**Rincian Belanja Dibayar di Muka**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2025	TA 2024
	Jumlah	0	0

### C.1.3. Persediaan

*Persediaan:  
Rp. 0*

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 130.900. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

**Persediaan per 31 Desember 2025 dan TA 2024**

No.	Uraian	31 Desember 2025	TA 2023
1	Barang Konsumsi	0	130.900
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
3	Persediaan lainnya	0	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>130.900</b>

Semua persediaan pada saat tanggal pelaporan dalam kondisi baik sebagaimana terdapat dalam opname fisik nomor 04/SEKPM/W1-Mil04/PL1/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

Saldo awal : 130.900

Pembelian : 41.825.407

Pemakaian : 41,956,307

Sisa akhir : 0

#### C.1.4. Persediaan yang Belum Diregister

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Persediaan yang belum diregister merupakan persediaan yang sudah dibeli dan dicatat di aplikasi persediaan tetapi belum dipertanggungjawabkan pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025.

## C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap :  
Rp.  
14.441.226.177*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji sebesar Rp. 14.441.226.177 dan Rp. 14.656.519.493. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

#### Rincian Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	2024	Perubahan
1	Tanah	10.466.081.000	10.466.081.000	0
2	Peralatan dan Mesin	3.894.271.984	3.835.484.274	58.787.710
3	Gedung dan Bangunan	4.650.227.000	4.650.227.000	0
4	Aset Tetap Lainnya	190.000	190.000	0
	Jumlah	19.010.769.984	18.951.982.274	58.787.710
	Akumulasi Penyusutan	(4.569.543.807)	(4.295.462.781)	(274.081.026)
	Nilai Buku Aset Tetap	14.441.226.177	14.656.519.493	(215.293.316)

#### C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp.  
10.466.081.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.466.081.000 dan Rp. 10.466.081.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

#### Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m <sup>2</sup> )	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	2.387 M <sup>2</sup>	08	MA RI	Tanah Kosong	6.846.393.000
2.	2	3.250 M <sup>2</sup>	36	MA RI	Gedung Kantor	3.619.688.000
Jumlah						10.466.081.000

#### C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan  
Mesin : Rp.  
3.894.271.984*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.894.271.984 dan Rp. 3.835.484.274. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	3.894.271.984
Mutasi Tambah	0
Pembelian	0
Mutasi Kurang	0
Penghentian aset dari penggunaan	0
Saldo per 31 Desember 2025	3.894.271.984
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(3.508.467.403)
Nilai Buku 31 Desember 2025	385.804.581

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan : Rp.  
4.650.227.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.650.227.000 dan Rp. 4.650.227.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	4.650.227.000
Mutasi Tambah	0
Koreksi nilai tim penertiban aset	0
Mutasi Kurang	0
Koreksi semu hasil penilaian kembali	0
Saldo per 31 Desember 2025	4.650.227.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(1.061.076.404)
Nilai Buku 31 Desember 2025	3.589.150.596

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,  
Irigasi, dan  
Jaringan :  
Rp.0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0 .

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2025	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku 31 Desember 2025	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya: Rp.  
190.000*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 190.000 dan Rp. 190.000.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2025	190.000
<b>Mutasi Tambah</b>	
Transfer Masuk	0
<b>Mutasi Kurang</b>	
Transfer Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2025	190.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku 31 Desember 2025	190.000

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam  
Pengerjaan :  
Rp. 0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
tetap :  
Rp.  
(4.569.543.807)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp. (4.569.543.807) dan Rp. (4.295.462.781).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.894.271.984	(3.508.467.403)	385.804.581
2	Gedung dan Bangunan	4.650.227.000	(1.061.076.404)	3.589.150.596
3	Aset Tetap Lainnya	190.000	0	190.000
<b>Jumlah</b>		<b>8.544.498.984</b>	<b>(4.295.462.781)</b>	<b>4.249.036.203</b>

### C.2.8. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 75.302.000 dan Rp. 75.302.000 . Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2025	75.302.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(75.302.000)
Nilai Buku 31 Desember 2025	0

Aset tak berwujud PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG pada tahun 2025 tidak mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan dikurangi oleh akumulasi penyusutan tahun berjalan. Aset ini berupa software yang digunakan untuk penyelesaian perkara tingkat banding tetapi saat ini aplikasi ini tidak digunakan lagi dalam penyelesaian perkara sehingga status BMN nya diubah menjadi aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional.

### C.4.1. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :  
Rp. 190,000

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 190.000,- dan Rp. 190.000; Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Militer I-04 Palembang serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2025	190.000
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>0</b>
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>0</b>
Saldo per 31 Desember 2025	190.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku 31 Desember 2025	190.000

### C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek :  
Rp. 1.086.093.657

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.086.093.657 dan Rp. 21.089.059. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Militer I-04 Palembang per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	TA 2024
Utang Kepada Pihak Ketiga	1.070.962.657	11.523.226
Utang yang belum ditagihkan		0
Pendapatan diterima dimuka	15.131.000	9.565.833
<b>Jumlah</b>	<b>1.086.093.657</b>	<b>21.089.059</b>

### C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang  
kepada Pihak  
Ketiga:  
Rp.  
1.070.962.657

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.070.962.657 dan Rp. 11.523.226. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG per tanggal 31 Desember 2025 pelaporan adalah sebagai berikut:

#### Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Utang kepada pihak ketiga	1.070.962.657	Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara dan Pembayaran Uang Makan Desember 2025
Jumlah		1.070.962.657	

### C.5.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Uang Muka  
dari  
KPPN:  
Rp. 15.131.000

Saldo Pendapatan diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 15.131.000 dan Rp. 9.565.833. Pendapatan diterima dimuka merupakan uang pendapatan dari sewa tanah yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

### C.6. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang  
Masih Harus  
Dibayar:  
Rp. 0

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

#### Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	TA 2023
	NIHIL	
Jumlah		

## C.7. Ekuitas

*Ekuitas: Rp.  
14.441.226.177*

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.441.226.177 dan Rp. 14.635.561.334. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan  
PNBP :  
Rp.9.565.833.*

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya yang merupakan pendapatan sewa tanah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.9.565.833 dan Rp.11.479.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

**Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2025 TA 2025**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	9.565.833	0
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>9.565.833</b>	<b>0</b>

### D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai  
: Rp.  
5.169.002.485*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.169.002.485 dan Rp. 3.239.911.363. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Pegawai	5.169.002.485	3.239.911.363	1.929.091.122	59,54
<b>Total Beban Pegawai</b>	<b>5.169.002.485</b>	<b>3.239.911.363</b>	<b>1.929.091.122</b>	<b>59,54</b>

### D.3. Beban Persediaan

*Beban  
Persediaan :  
Rp. 41.601.307*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 41.601.307 dan Rp. 42.554.275. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	41.601.307	42.554.275	952.968	2,24
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>41.601.307</b>	<b>42.554.275</b>	<b>952.968</b>	<b>2,24</b>

### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang  
dan Jasa : Rp.  
874.877.451*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 874.877.451 dan Rp. 972.911.420. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2025 dan TA 2024**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	649.750.419	783.967.693	(134.217.274)	17,12
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	4.000.000	6.722.410	2.722.410	40,50
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	53.088.000	34.944.000	18.144.000	51,92
Beban Barang Operasional Lainnya	4.200.000	2.100.000	2.100.000	100
Beban Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Beban Langganan Listrik	0	0	0	0
Beban Langganan Telepon	5.942.926	6.015.161	(72.235)	1,2
Beban Langganan Air	13.819.246	15.962.156	(2.142.910)	13,42
Beban sewa	130.609.000	123.200.000	7.409.000	6,01
<b>Total Beban Barang Jasa</b>	<b>874.877.451</b>	<b>972.911.420</b>	<b>(98.033.969)</b>	<b>10,08</b>

## D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan: Rp.371.870.813*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 371.870.813 dan Rp. 450.518.253. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan TA 2024**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	234.452.295	257.462.940	(23.010.645)	(8,94)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	137.063.518	189.988.313	(52.924.795)	(27,86)
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>371.870.813</b>	<b>450.518.253</b>	<b>(78.647.440)</b>	<b>(17,46)</b>

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas : Rp. 24.432.642*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 24.432.642 dan Rp. 51.861.770. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	23.082.642	49.011.770	(25.929.128)	(52,90)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	1.350.000	2.850.000	(1.500.000)	(53,63)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Pengembalian belanja	0	0	0	0
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>24.432.642</b>	<b>51.861.770</b>	<b>(27.429.128)</b>	<b>(52,89)</b>

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp. 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat  
per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
<b>Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan  
Sosial : Rp.0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial  
per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
<b>Total Beban Bantuan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. (273.831.276)*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. (273.831.276) dan Rp. (279.032.967). Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(137.063.518)	(185.834.311)	(48.770.793)	(26,24)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	(234.452.295)	(93.198.656)	(141.253.639)	(151,56)
Beban Amortisasi Lisensi	0	0	0	0
<b>Total Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>(273.831.276)</b>	<b>(279.032.967)</b>	<b>(5.201.691)</b>	<b>(1,86)</b>

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Piutang tak Tertagih  
per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
<b>Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain  
: Rp.0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Lain-lain  
per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Lain-lain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.12. Kegiatan Non Operasional

*Kegiatan Non  
Operasional :  
Rp. 0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun)	%
Pendapatan pelepasan aset non lancar	0	0	0	0
Beban pelepasan aset non lancar	0	0	0	0
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0	0
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0	0
<b>Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar Biasa : Rp.0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2025 adalah sebagai berikut:

**Rincian Pos Luar Biasa  
per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun)	%
Pendapatan PNPB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
<b>Total Pos Luar Biasa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.635.561.334 dan Rp. 14.908.725.540.

### E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah

sebesar Rp. (6.746.050.024) dan Rp. (5.034.876.881). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

#### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 Dan Rp.0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan  
per 31 Desember TA 2025  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
<b>Total Koreksi Nilai Persediaan</b>	<b>0</b>

#### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Selisih revaluasi ini merupakan revaluasi BMN/penilaian kembali tanah dan gedung bangunan kantor dan rumah dinas PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG oleh KPKNL Palembang.

#### E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025

dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

#### Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Aset tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Software	0
Jumlah	0

### E.4.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 koreksi ini merupakan koreksi atas beban langganan daya jasa dan speedy atas pemakaian bulan Desember 2024. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain  
per 31 Desember TA 2025  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

### E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.465.621.210 dan Rp. 4.761.712.675. Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari :

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 31 Desember TA 2025  
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.465.621.210
Transfer keluar	0
Transfer masuk	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
<b>Jumlah</b>	<b>5.465.621.210</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

**E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 0.

**E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.0 terdiri dari:

Nama satker	Transfer keluar	Transfer masuk
Pengadilan Militer I-04 Palembang	0	
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak menerima transfer masuk dalam bentuk apapun per periode 31 Desember 2025.

**E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31

Desember 2025 sebesar Rp.0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
Total Pengesahan		0
Pengesahan Pengembalian Hibah		0
Jumlah		0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran.

## E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 13.355.132.520 dan Rp. 14.635.561.334.

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

#### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK yang dapat diungkapkan dalam laporan keuangan tahun ini maupun semester lalu.

#### F.2.2. Rekening Pemerintah

Telah menggunakan Rekening Virtual BRI pada Cabang A Rivai Palembang A/C 653246632111000 a.n. BPG 014 Dilmil I-04 Palembang yang digunakan sebagai Penampung Kas Bendahara Pengeluaran DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### **F.2.3. Revisi DIPA**

---

Untuk periode per 31 Desember 2025 telah dilakukan revisi Dipa sebanyak 11 kali, yaitu revisi Dipa pertama pada tanggal 23 Februari 2025, revisi Dipa kedua pada tanggal 23 Maret 2025, revisi Dipa ketiga pada tanggal 21 April 2025, revisi Dipa keempat pada tanggal 09 Juli 2025, revisi Dipa kelima pada tanggal 22 Juli 2025, revisi Dipa keenam pada tanggal 27 Agustus 2025, revisi Dipa ketujuh pada tanggal 23 September 2025, revisi Dipa kedelapan pada 08 Oktober 2025, revisi Dipa kesembilan pada 24 Oktober 2025, revisi Dipa kesepuluh pada 28 Oktober 2025 dan revisi Dipa kesebelas pada tanggal 14 November 2025.

### **F.2.4. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

---

Per tanggal 31 Desember 2025 tidak terdapat ralat SPM .

### **F.2.5. Catatan Penting Lainnya**

---

Nihil.

DRAFT

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
**ESELON I** : ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 1100 ) SUMATERA SELATAN  
**SATUAN KERJA** : ( 663211 ) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG

Tgl Data : 13/02/26 7:44 AM  
Tgl Cetak : 13/02/26 11:35 AM  
Halaman : 1  
lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	9,565,833	1,913,167	7,652,666	400
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	9,565,833	1,913,167	7,652,666	400
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	9,565,833	1,913,167	7,652,666	400
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	5,169,002,485	3,239,911,363	1,929,091,122	59.541
Beban Persediaan	41,601,307	42,554,275	(952,968)	(2.239)
Beban Barang dan Jasa	874,877,451	972,911,420	(98,033,969)	(10.076)
Beban Pemeliharaan	371,870,813	450,518,253	(78,647,440)	(17.457)
Beban Perjalanan Dinas	24,432,642	51,861,770	(27,429,128)	(52.889)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
**ESELON I** : ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 1100 ) SUMATERA SELATAN  
**SATUAN KERJA** : ( 663211 ) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG

Tgl Data : 13/02/26 7:44 AM  
Tgl Cetak : 13/02/26 11:35 AM  
Halaman : 2  
lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	273,831,276	279,032,967	(5,201,691)	(1.864)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>6,755,615,974</b>	<b>5,036,790,048</b>	<b>1,718,825,926</b>	<b>34.125</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(6,746,050,141)</b>	<b>(5,034,876,881)</b>	<b>(1,711,173,260)</b>	<b>33.986</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	117	0	117	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	117	0	117	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(6,746,050,024)</b>	<b>(5,034,876,881)</b>	<b>(1,711,173,143)</b>	<b>33.986</b>
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(6,746,050,024)</b>	<b>(5,034,876,881)</b>	<b>(1,711,173,143)</b>	<b>33.986</b>

---

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Palembang, 13 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Supriyadi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP. 21950303390275

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
UNIT ORGANISASI : ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
WILAYAH/PROVINSI : ( 1100 ) SUMATERA SELATAN  
SATUAN KERJA : ( 663211 ) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG

Tgl Data : 13/02/26 6:38 AM  
Tgl Cetak : 13/02/26 11:35 AM  
Halaman : 1  
lap\_lpe\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	14,635,561,334	14,908,725,540	(273,164,206)	(1.83)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6,746,050,024)	(5,034,876,881)	(1,711,173,143)	33.99
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	5,465,621,210	4,761,712,675	703,908,535	14.78
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,280,428,814)	(273,164,206)	(1,007,264,608)	368.74
EKUITAS AKHIR	13,355,132,520	14,635,561,334	(1,280,428,814)	(8.75)

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Palembang, 13 Februari 2026  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran

Supriyadi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP. 21950303390275



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG 005  
**ESELON I** : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01  
**SATUAN KERJA** : PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG 663211

Tgl Data : 13/02/26 7:44 AM  
Tgl Cetak : 13/02/26 11:35 AM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>5,475,086,000</b>	<b>5,422,214,367</b>	<b>(52,871,633)</b>	<b>99.03</b>	<b>4,825,147,000</b>	<b>4,773,191,675</b>	<b>(51,955,325)</b>	<b>98.92</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Palembang, 13 Februari 2026  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran

Supriyadi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP. 21950303390275

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG**  
**UNIT ORGANISASI : ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 1100 ) SUMATERA SELATAN**  
**SATUAN KERJA : ( 663211 ) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG**

Tgl Data : 13/02/26 7:44 AM  
Tgl Cetak : 13/02/26 11:35 AM  
Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Persediaan	0	130,900	(130,900)	(100.00)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>0</b>	<b>130,900</b>	<b>(130,900)</b>	<b>(100.00)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	10,466,081,000	10,466,081,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,894,271,984	3,835,484,274	58,787,710	1.53
Gedung dan Bangunan	4,650,227,000	4,650,227,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	190,000	190,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,569,543,807)	(4,295,462,781)	(274,081,026)	6.38
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>14,441,226,177</b>	<b>14,656,519,493</b>	<b>(215,293,316)</b>	<b>(1.47)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	75,302,000	75,302,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(75,302,000)	(75,302,000)	0	0.00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>14,441,226,177</b>	<b>14,656,650,393</b>	<b>(215,424,216)</b>	<b>(1.47)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,070,962,657	11,523,226	1,059,439,431	9,193.95
Pendapatan Diterima Dimuka	15,131,000	9,565,833	5,565,167	58.18
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>1,086,093,657</b>	<b>21,089,059</b>	<b>1,065,004,598</b>	<b>5,050.03</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>1,086,093,657</b>	<b>21,089,059</b>	<b>1,065,004,598</b>	<b>5,050.03</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	13,355,132,520	14,635,561,334	(1,280,428,814)	(8.75)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>13,355,132,520</b>	<b>14,635,561,334</b>	<b>(1,280,428,814)</b>	<b>(8.75)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>13,355,132,520</b>	<b>14,635,561,334</b>	<b>(1,280,428,814)</b>	<b>(8.75)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>14,441,226,177</b>	<b>14,656,650,393</b>	<b>(215,424,216)</b>	<b>(1.47)</b>

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Palembang, 13 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Supriyadi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP. 21950303390275

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : ( 1100 ) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : ( 663211 ) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG

Tgl Data : 13/02/26 7:44 AM

Tgl Cetak : 13/02/26 11:35 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	131111	Tanah	10,466,081,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,894,271,984	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,650,227,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	190,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,508,467,403
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,061,076,404
0.0	162161	Lisensi	75,302,000	0
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	75,302,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	1,057,263,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	13,699,657
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	15,131,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,422,214,367
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	15,131,117	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	58,537,960
0.0	391111	Ekuitas	0	14,635,561,334
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	9,565,833
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	117
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	675,789,580	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	9,696	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	63,237,412	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	17,267,982	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	20,520,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	30,520,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	5,978,984	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	43,669,260	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	113,174,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	20,475,000	0
3.0	511223	Beban Tunj. Struktural TNI/POLRI	17,640,000	0
3.0	511224	Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	36,840,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	286,929,947	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	3,644,000,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	129,884,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,392	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	9,421,000	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2,909,352	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	8,980,080	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	33,693,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	8,060,000	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : ( 1100 ) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : ( 663211 ) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG

Tgl Data : 13/02/26 7:44 AM

Tgl Cetak : 13/02/26 11:35 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	649,750,419	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,000,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	53,088,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	4,200,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	280,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	689,113	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	12,498,747	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,942,926	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	13,819,246	0
3.0	522141	Beban Sewa	130,609,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	234,452,295	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	137,063,518	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	23,082,642	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,350,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	180,632,620	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	93,198,656	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	41,601,307	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	355,000	0
<b>JUMLAH</b>			<b>25,856,819,075</b>	<b>25,856,819,075</b>

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Palembang, 13 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Supriyadi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP. 21950303390275

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : ( 1100 ) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : ( 663211 ) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG

Tgl Data : 13/02/26 6:38 AM

Tgl Cetak : 13/02/26 11:35 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	5,422,214,367
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	15,131,117	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	15,131,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	117
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	675,789,580	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9,751	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	63,237,412	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	17,267,982	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	20,520,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	30,520,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	5,978,984	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	43,669,260	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	111,122,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	20,475,000	0
3.0	511223	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	17,640,000	0
3.0	511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	36,840,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	286,929,947	0
3.0	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,604,800,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	129,884,800	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,392	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	9,421,000	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,909,352	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8,980,080	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	25,462,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	8,060,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	649,750,419	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,000,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	53,088,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4,200,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	280,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	689,113	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	41,825,407	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	6,443,542	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	15,860,946	0
3.0	522141	Belanja Sewa	130,609,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	234,452,295	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	137,063,518	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23,082,642	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
UNIT ORGANISASI : ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
WILAYAH/PROVINSI : ( 1100 ) SUMATERA SELATAN  
SATUAN KERJA : ( 663211 ) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG

Tgl Data : 13/02/26 6:38 AM

Tgl Cetak : 13/02/26 11:35 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,350,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	55
<b>JUMLAH</b>			<b>5,437,345,539</b>	<b>5,437,345,539</b>

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Palembang, 13 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Supriyadi, S.H., M.H.

21950303390275

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 005      **MAHKAMAH AGUNG**  
**ESELON I** : 01      **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 1100      **SUMATERA SELATAN**  
**SATUAN KERJA** : 663211      **PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG**  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 13/02/26 11:35 AM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker\_poc  
 Tgl Data : 13/2/26 8:35 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	726,969,000	676,866,000	675,789,580	0	675,789,580	99.84	1,076,420
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,000	12,000	9,751	55	9,696	80.8	2,304
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	58,223,000	63,439,000	63,237,412	0	63,237,412	99.68	201,588
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	17,780,000	17,396,000	17,267,982	0	17,267,982	99.26	128,018
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	22,680,000	21,740,000	20,520,000	0	20,520,000	94.39	1,220,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	49,000,000	30,560,000	30,520,000	0	30,520,000	99.87	40,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	36,520,000	6,306,000	5,978,984	0	5,978,984	94.81	327,016
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	43,800,000	43,800,000	43,669,260	0	43,669,260	99.7	130,740
511129	Belanja Uang Makan PNS	152,640,000	115,000,000	111,122,000	0	111,122,000	96.63	3,878,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	29,960,000	20,560,000	20,475,000	0	20,475,000	99.59	85,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111</b>	<b>1,137,582,000</b>	<b>995,679,000</b>	<b>988,589,969</b>	<b>55</b>	<b>988,589,914</b>	<b>99.29</b>	<b>7,089,086</b>
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri							
511223	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	17,640,000	17,640,000	17,640,000	0	17,640,000	100	0
511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	2,520,000,000	38,150,000	36,840,000	0	36,840,000	96.57	1,310,000
511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	182,000,000	1,000	0	0	0	0	1,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5112</b>	<b>2,719,640,000</b>	<b>55,791,000</b>	<b>54,480,000</b>	<b>0</b>	<b>54,480,000</b>	<b>97.65</b>	<b>1,311,000</b>
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	0	298,762,000	286,929,947	0	286,929,947	96.04	11,832,053
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	2,610,141,000	2,604,800,000	0	2,604,800,000	99.8	5,341,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113</b>	<b>0</b>	<b>2,908,903,000</b>	<b>2,891,729,947</b>	<b>0</b>	<b>2,891,729,947</b>	<b>99.41</b>	<b>17,173,053</b>
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	130,000,000	129,884,800	0	129,884,800	99.91	115,200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	11,000	2,392	0	2,392	21.75	8,608
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	9,500,000	9,421,000	0	9,421,000	99.17	79,000
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	3,000,000	2,909,352	0	2,909,352	96.98	90,648
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	9,000,000	8,980,080	0	8,980,080	99.78	19,920
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	27,000,000	25,462,000	0	25,462,000	94.3	1,538,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	8,100,000	8,060,000	0	8,060,000	99.51	40,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116</b>	<b>0</b>	<b>186,611,000</b>	<b>184,719,624</b>	<b>0</b>	<b>184,719,624</b>	<b>98.99</b>	<b>1,891,376</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51</b>	<b>3,857,222,000</b>	<b>4,146,984,000</b>	<b>4,119,519,540</b>	<b>55</b>	<b>4,119,519,485</b>	<b>99.34</b>	<b>27,464,515</b>
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 005      **MAHKAMAH AGUNG**  
**ESELON I** : 01      **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 1100      **SUMATERA SELATAN**  
**SATUAN KERJA** : 663211      **PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG**  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 13/02/26 11:35 AM  
 Halaman : 2  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker\_poc  
 Tgl Data : 13/2/26 8:35 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	827,622,000	649,754,000	649,750,419	0	649,750,419	100	3,581
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,000,000	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	100	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	53,088,000	53,088,000	53,088,000	0	53,088,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>899,910,000</b>	<b>711,042,000</b>	<b>711,038,419</b>	<b>0</b>	<b>711,038,419</b>	<b>100</b>	<b>3,581</b>
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	300,000	300,000	280,000	0	280,000	93.33	20,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	700,000	689,113	0	689,113	98.44	10,887
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>969,113</b>	<b>0</b>	<b>969,113</b>	<b>96.91</b>	<b>30,887</b>
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	41,832,000	41,832,000	41,825,407	0	41,825,407	99.98	6,593
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>	<b>41,832,000</b>	<b>41,832,000</b>	<b>41,825,407</b>	<b>0</b>	<b>41,825,407</b>	<b>99.98</b>	<b>6,593</b>
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	8,400,000	8,400,000	6,443,542	0	6,443,542	76.71	1,956,458
522113	Belanja Langganan Air	12,600,000	19,200,000	15,860,946	0	15,860,946	82.61	3,339,054
522141	Belanja Sewa	124,460,000	147,140,000	130,609,000	0	130,609,000	88.77	16,531,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>145,460,000</b>	<b>174,740,000</b>	<b>152,913,488</b>	<b>0</b>	<b>152,913,488</b>	<b>87.51</b>	<b>21,826,512</b>
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	191,052,000	234,482,000	234,452,295	0	234,452,295	99.99	29,705
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	166,060,000	137,646,000	137,063,518	0	137,063,518	99.58	582,482
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>357,112,000</b>	<b>372,128,000</b>	<b>371,515,813</b>	<b>0</b>	<b>371,515,813</b>	<b>99.84</b>	<b>612,187</b>
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51,720,000	25,860,000	23,082,642	0	23,082,642	89.26	2,777,358
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000	1,500,000	1,350,000	0	1,350,000	90	150,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>54,720,000</b>	<b>27,360,000</b>	<b>24,432,642</b>	<b>0</b>	<b>24,432,642</b>	<b>89.3</b>	<b>2,927,358</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>1,500,034,000</b>	<b>1,328,102,000</b>	<b>1,302,694,882</b>	<b>0</b>	<b>1,302,694,882</b>	<b>98.09</b>	<b>25,407,118</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5,357,256,000</b>	<b>5,475,086,000</b>	<b>5,422,214,422</b>	<b>55</b>	<b>5,422,214,367</b>	<b>99.03</b>	<b>52,871,633</b>